

RAPAT KORDINASI PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

- Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
- Pukul : 13.00 WIB
- Lokasi : Kantor BPBPK Propinsi Kalimantan Tengah
- Acara : Rapat koordinasi Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Prpinsi Kalimantan Tengah
- Peserta :
1. BPBD KOTA PALANGKA RAYA,
2. BPBD PULANG PISAU,
3. BPBD BARSEL,
4. BPBD MUARA TEWEH,
5. BPBD KATINGAN,
6. BPBD KOBAR,
7. BPBD BARTIM,
8. BPBD SUKAMARA,
9. BPBD GUNUNG MAS,
10. BPBD BARUT,
11. BPBD SERUYAN
- Materi :
1. Kondisi Iklim Terkini Kalteng 1901 – 2023
2. Mekanisme Penanganan Darurat Bencana
3. Pencegahan dan kesiapsiagaan Menghadapi Karhutla dan Rencana Dukungan terhadap Kabupaten / Kota
- Susunan Acara :
1. Rapat dibuka oleh KALAKSA BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah
2. Paparan materi
3. Penanda tangan kesepakatan oleh semua peserta Rakor
- Kesimpulan :
1. BPBD Kabupaten/Kota mengintensifkan pencegahan dan pengendalian karhutla melalui patroli dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pada daerah rawan karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla.
2. BPBD Kabupaten/Kota meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian karhutla dengan memastikan seluruh SDM dan sarpras dalam kondisi siap sehingga secepatnya melaksanakan respon jika ada kejadian karhutla.
3. BPBD Kabupaten/Kota menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2023 sehingga kebutuhan anggaran untuk menghadapi karhutla tahun 2023 ini bisa tersedia secara memadai.
4. BPBD Kabupaten/Kota segera mengajukan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Menteri LHK Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
5. Berdasarkan poin 4 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sehingga penanganan karhutla bisa dilaksanakan secara maksimal.

6. Pemerintah Provinsi berdasarkan poin 5 mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana operasi (Teknologi Modifikasi Cuaca, Helikopter Water Boombing, Peralatan dan lain-lain)

Demikian Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi ini disepakati sebagai bahan tindak lanjut oleh masing-masing pihak.



